

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketidaksetaraan gender telah menjadi suatu isu yang masih menjadi concern utama masyarakat dunia. Hal ini disebabkan umumnya, mayoritas masyarakat menilai bahwa seks dan gender merupakan dua hal yang sama, akan tetapi secara definisi sebenarnya kedua hal tersebut berbeda. Seks adalah sebuah kodrat yang telah ada secara alamiah atau dapat dikatakan sebagai anugerah atas pemberian Tuhan kepada manusia sejak lahir.¹ Sedangkan gender adalah perbedaan pembagian peran serta tanggungjawab antara laki-laki dan perempuan dimana adanya perbedaan nilai dan perilaku yang terlihat antara laki-laki dan perempuan disebabkan karena konstruksi sosial dari komunitas masyarakat dan dapat berbeda dari segi tempat maupun waktu.²

Ketidakpahaman masyarakat mengenai nilai dari perbedaan seks dan gender membuat perempuan mengalami ketidaksetaraan gender. Ketidaksetaraan gender yang terjadi di berbagai bidang saling berhubungan dan penyebabnya cenderung tertanam dalam paham yang dianut masyarakat setempat. Misalnya budaya patriarki yang melekat di dalam masyarakat yang membatasi hak-hak perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Pandangan ini sudah mendarah daging di berbagai negara, terutama negara berkembang, dan membuat posisi perempuan sebagai golongan kelas dua.

¹ Ani Soetjipto dan Pande Trimayuni. 2013. Gender dan Hubungan Internasional: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Jalasutra. Hal 7-8.

² Dede Wiliam-de Vries. 2006. Gender Bukan Tabu Catatan Perjalanan Fasilitasi Kelompok Perempuan di Jambi. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR). Hal 3.

Suara perempuan tidak didengar dan mereka memiliki akses terbatas untuk dapat hidup secara mandiri. Dalam beberapa kebudayaan, perempuan merupakan milik ayah ataupun suaminya. Hal ini juga mengekspos perempuan terhadap kekerasan yang terjadi baik di ruang privat maupun public.³

Adanya patriarki menegaskan bahwa kekerasan berbasis gender tidak terbatas pada kekerasan fisik yaitu pemukulan, pemerkosaan, perdagangan perempuan dan anak, pembunuhan demi kehormatan, kekerasan seksual, tetapi juga kekerasan budaya atau adat dan struktural. Contoh kekerasan berbasis gender budaya termasuk pernikahan paksa dan pertukaran perempuan dan anak perempuan untuk menyelesaikan perselisihan antara laki-laki. Bentuk struktural kekerasan berbasis gender sangat umum terjadi di masyarakat. Dalam kasus penolakan kesetaraan gender perempuan, pengurangan atau penghapusan kesempatan, akses ke sumber daya (pendidikan, pengembangan pribadi, kesempatan kerja), dan pelanggaran lain terhadap satu gender, korban biasanya perempuan. Meski hal ini bisa terjadi pada laki-laki, namun pada akhirnya perempuan tetap menjadi sasaran utama pelaku kekerasan.

Kekerasan berbasis gender juga dipengaruhi oleh sikap, keyakinan, dan budaya yang diskriminatif, sehingga menyebabkan perilaku kekerasan menjadi wajar. Berbagai faktor pendukung lainnya, seperti sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan hak para pelaku kejahatan dan kekerasan berbasis gender untuk

³Ayurshi Dutt, "Locating Patriarchy in Violence Against Women in India: Social, Legal, and Alternative Responses," *PEOPLE: International Journal of Social Sciences* 4, no. 2.

mendapatkan impunitas, turut andil dalam melanggengkan budaya kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, khususnya terhadap perempuan.⁴

Perilaku Kekerasan berbasis gender terkait Hak Asasi Manusia telah mengancam keamanan pada manusia itu sendiri dimana, manusia lahir dengan hak dan martabat yang setara. Dalam hal ini sebagai sesama manusia, sudah sepantasnya dunia internasional memandang hak asasi manusia sebagai sesuatu berlaku pada seluruh manusia. Setiap manusia mempunyai hak yang tercantum tersebut tanpa pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, dimana kebangsaan atau kemasyarakatan, kepemilikan, kelahiran ataupun kedudukan lain berasal.⁵ Tetapi dalam kenyataannya diberbagai lapis kehidupan seperti politik, ekonomi, pendidikan, sosial dan budaya. gender merupakan salah faktor penentu hak apa saja yang diperoleh setiap manusia.

Pada kawasan asia selatan negara Pakistan merupakan salah satu negara yang masih kuat dengan budaya patriarki. Sehingga dalam segala aspek posisi perempuan Pakistan cenderung terbelakang baik dalam aspek politik, ekonomi dan sosial.⁶Melihat hal tersebut situasi Hak Asasi Manusia di Pakistan cukup rumit, yang mana mengenai konteks Hak Asasi Manusia pada masyarakat Pakistan budaya menjadi tantangan utama. Mengingat Pakistan merupakan negara

⁴ Nur Azizah , Febri Rahmawati, "Kekerasan Berbasis Gender di Pakistan," https://www.researchgate.net/publication/358634893_Kekerasan_Berbasis_Gender_di_Pakistan pada 15 Maret 2022.

⁵Universal Declaration of Human Rights, Preamble, Di akses melalui: https://www.ohchr.org/sites/default/files/UDHR/Documents/UDHR_Translations/eng.pdf, pada 15 Maret 2022.

⁶ Sabina Khan, Women: Pakistan's second-class citizens. Di akses melalui <https://tribune.com.pk/story/584098/womenpakistans-second-class-citizens/> pada 15 maret 2022.

dengan populasi yang cukup besar beserta keragamannya. Status Pakistan sebagai negara berkembang dan berdaulat, dengan bentuk negara gabungan republik islam dan demokrasi islam antara hukum islam dan sekuler juga membuat situasi di Pakistan semakin kompleks.

Perempuan Pakistan menderita berbagai macam kekerasan atau ancaman dalam kehidupan sehari-hari baik di rumah, tempat kerja, atau diruang publik. Bentuk kekerasan dan kejahatan yang sering terjadi terhadap perempuan dan anak perempuan di Pakistan adalah budaya karo-kari atau pembuhuan demi kehormatan, dalam kasus tersebut, seringkali terjadi akibat sistem patriarki yang selalu meyudutkan kaum perempuan. Kasus lain adalah, dowry atau membayar mahar perempuan terhadap calon pengantin laki-laki. Praktik tersebut menyebar luas hampir diseluruh Pakistan.⁷ Kekerasan berbasis gender dalam bentuk kekerasan dan penyerangan seksual, kekerasan fisik hingga kekerasan domestic masih menghantui perempuan Pakistan hingga kini.⁸

Pada 2018 oleh World Economic Forum, Pakistan peringkat 148 dari 149 negara tentang perbedaan gender. Perlakuan ketidaksetaraan gender tidak hanya dilakukan oleh warga tetapi juga polisi dan peradilan, kata HRW. Ini menjadi

⁷ Sanchitta Bhattacharya, "Status of Women in Pakistan," *J.R.S.P.*, (online), Vol.51, No.1 (2014), Hal. 188, https://www.researchgate.net/publication/272354884_Status_of_Women_in_Pakistan, pada 15 Maret 2022.

⁸ Abdul Hadi, "Patriarchy and Gender-Based Violence in Pakistan," *European Journal of Social Sciences Education and Research*, (online), Vol.10, No.2, https://www.researchgate.net/publication/318536680_Patriarchy_and_Gender-Based_Violence_in_Pakistan, pada 15 Maret 2022.

alasan utama mengapa banyak korban enggan bersaksi atau melapor.⁹ Di tahun yang sama yaitu 2018, Organisasi Hak Asasi Manusia Independen Komisi Hak Asasi Manusia Pakistan melaporkan setidaknya 845 insiden kekerasan seksual terhadap perempuan. Meskipun kelompok pemantau memperingatkan bahwa banyak kasus tidak dilaporkan. Pada Mei, *Human Right Watch* mengeluarkan peringatan atas peran polisi dalam kasus-kasus kekerasan seksual, dengan petugas melakukan pelanggaran sendiri dan melecehkan dan mengintimidasi para pelapor.

Tahun 2020 menjadi masalah yang serius mengenai kekerasan berbasis gender di Pakistan, dimana pemerkosaan, pembunuhan, serangan asam, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan paksa menyebabkan Pakistan hampir berada di bagian terbawah indeks gender global di Forum Ekonomi Dunia WEF yaitu di posisi 153 dari 156. Dalam perkiraan pembela hak asasi manusia sekitar 1.000 wanita terbunuh dalam apa yang disebut pembunuhan demi kehormatan setiap tahun. Data dari saluran bantuan KDRT di seluruh Pakistan menunjukkan bahwa kasus KDRT meningkat 200 persen dari Januari-Maret 2020. Dalam kasus lain mengenai pernikahan anak tetap menjadi masalah serius di Pakistan, terdapat 21 persen anak perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dan 3 persen menikah sebelum usia 15 tahun. Wanita dari komunitas agama minoritas tetap sangat rentan terhadap pernikahan paksa.¹⁰ Kenaikan terhadap angka tersebut pada Maret 2020 lebih buruk ketika diberlakukan lockdown karena perebakan luas

⁹Eka Yudha Saputra, Pakistan Buat 1.000 Pengadilan untuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Di akses melalui: <https://dunia.tempo.co/read/1216898/pakistan-buat-1-000-pengadilan-untuk-kekerasan-terhadap-perempuan/full&view=ok>, pada 16 Maret 2022.

¹⁰*Human Rights watch*, Pakistan Events of 2020, Di akses melalui: <https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/pakistan>, pada 16 Maret 2022.

pandemi virus corona menyebabkan perilaku laki-laki yang agresif cenderung kasar dan sulit dikendalikan terhadap perempuan di Pakistan meningkat. Banyaknya serangan pembunuhan demi kehormatan keluarga atau dikenal sebagai “honor killing” di Pakistan yang pelakunya merupakan keluarga yaitu, abang, ayah atau anggota laki-laki lainnya.¹¹

Dalam Praktik pembunuhan demi kehormatan yang kejam tidak hanya lazim di Pakistan tetapi juga orang Pakistan yang tinggal di luar negeri juga tampaknya mengikuti tradisi ini, memastikan mereka mengadopsi semua yang mereka tinggalkan di negara asal mereka. Salah satu insiden yang dilakukan oleh keluarga Pakistan dilaporkan di Italia minggu lalu di mana seorang gadis bernama Saman Abbas, 18, diduga dibunuh oleh keluarganya untuk kehormatan karena dia keberatan dengan keputusan orang tuanya yang menikahnya dengan sepupunya, sementara dia tertarik pada orang lain yang dia temukan di Italia dan ingin menghabiskan hidupnya bersama.¹² Hal ini merupakan salah satu dari beberapa kasus pembunuhan yang di alami gadis-gadis di Pakistan.

Menurut Zohra Yusuf, mantan ketua komisi hak asasi manusia non-pemerintah Pakistan (HRCP) mengatakan, “ortodoksi feodal dan norma-norma konservatif memiliki akar yang dalam di Pakistan. Pria ingin mengontrol wanita dan mereka memperlakukan mereka sebagai 'properti' mereka. Mereka tidak

¹¹ VOA.”Kekerasan Terhadap Perempuan di Pakistan Dinilai Sudah Jadi “Pandemi”, Di akses melalui:<https://www.voaindonesia.com/a/kekerasan-terhadap-perempuan-di-pakistan-dinilai-sudah-jadi-pandemi-/5991652.html>, pada 16 Maret 2022.

¹² Umaya Khusniah. “Tolak Perjudohan, Gadis Ini Diduga Dibunuh Keluarga”. Diakses melalui: <https://www.inews.id/news/internasional/tolak-perjudohan-gadis-ini-diduga-dibunuh-keluarga> pada 16 maret 2022.

memberikan kebebasan kepada perempuan. Dan tingkat hukuman dalam kasus pembunuhan demi kehormatan hanya 2,0% sedangkan tingkat pembebasan adalah 20,9%.¹³

Perempuan Pakistan menjadi lebih rentan terhadap kekerasan berbasis gender akibat peran mereka yang dibatasi dan dikontrol oleh superioritas laki-laki. Tingkat kekerasan berbasis gender, termasuk kekerasan terhadap perempuan di Pakistan terus meningkat dari tahun ke tahun.¹⁴ Menurut World Economic Forum tahun 2021 parahnya sistem patriarki menyebabkan rendahnya kesetaraan gender di Pakistan yang menempati dua terbawah, yaitu peringkat 153 dari 156 negara dan peringkat 7 dari 8 negara di Asia Selatan dalam survei “Global Gender Gap 2021”.¹⁵

Merespon Adanya hal tersebut pemerintah Pakistan telah mengadopsi sejumlah komitmen internasional utama untuk kesetaraan gender dan hak asasi perempuan seperti, DUHAM 1948, Platform Aksi Beijing, Konvensi Penghapusan segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pakistan dalam ratifikasi nya sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW, pada tahun 2004 telah mengesahkan undang-undang yang menetapkan hukuman penjara 7 tahun sampai hukuman mati bagi kasus yang terkait dengan honour-killing (karo-kari) dan membentuk kebijakan-

¹³ Mehnil Khalid Kunwar, Honour killings remain unchallenged, Di akses melalui: <https://www.pakistantoday.com.pk/2021/06/28/honour-killings-remain-unchallenged/>, pada 16 Maret 2022.

¹⁴ Human Rights Watch, World Report 2021 Events Of 2020, Di akses melalui: https://www.hrw.org/sites/default/files/media_2021/01/2021_hrw_world_report.pdf, pada 16 Maret 2022.

¹⁵ World Economic Forum, Global Gender Gap Report 2021, Di akses melalui: https://www3.weforum.org/docs/WEF_GGGR_2021.pdf, pada 16 Maret 2022.

kebijakan yang berpihak pada perempuan dan anak perempuan yang mengalami kekerasan berbasis gender seperti *National Policy for Development and Empowerment of Women* 2002.¹⁶ Dengan meratifikasi konvensi ini, Pakistan telah mendukung gerakan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan mempromosikan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.

Penyebab tingginya angka kekerasan berbasis gender di Pakistan juga karena lemahnya komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan hukum terkait peratifikasian CEDAW yang telah di lakukan oleh pemerintah Pakistan sejak tahun 1996, dalam kebijakan-kebijakan yang diberlakukan dalam melindungi perempuan kurang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena diskriminasi yang didasarkan pada gender masih terjadi. Itulah yang membuat Peringkat Pakistan untuk kesetaraan gender tetap menjadi salah satu yang terendah di dunia. Menunjukkan bahwa pemerintah Pakistan belum dapat menyelesaikan permasalahan kekerasan perempuan di Pakistan sehingga membutuhkan bantuan terkait kekerasan berbasis gender di negara nya.

Untuk memaksimalkan upaya penyelesaian masalah ketidaksetaraan perempuan di dunia, PBB menciptakan sebuah entitas atau organisasi yang berfokus dalam gender equality dan pemberdayaan perempuan. Entitas yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang diciptakan PBB adalah UN Women. UN Women hadir sebagai salah satu agenda reformasi

¹⁶ asruchin, m. (2012, july 17). kompasian beyond blogging. Dipetik february 14, 2017, dari honour killing di pakistan (wanita sebagai lambang properti dan lambang kehormatan pria): http://www.kompasiana.com/asruchin/honour-killing-dipakistan-wanita-sebagai-properti-dan-lambang-kehormatanpria_55125c7c8133119e53bc67c0

PBB, menyatukan sumber daya serta mandat untuk menciptakan perubahan dan dampak yang lebih besar sehingga secara signifikan meningkatkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan gender equality, memperluas kesempatan, dan mengatasi diskriminasi di seluruh dunia.¹⁷ UN Women tidak hanya ada di berbagai negara yang sering terjadi pelanggaran HAM, namun UN Women juga hadir di Benua Asia salah satunya yaitu Pakistan.

UN Women hadir untuk membantu pemerintah Pakistan dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di negara nya. UN Women merupakan sebuah organisasi internasional yang melakukan pemberdayaan perempuan serta memperjuangkan hak-hak dan perlindungan perempuan. UN Women di Pakistan telah bekerja sama dengan pemerintah, organisasi masyarakat sipil, akademisi, media, sektor public dan swasta untuk menangani prioritas nasional kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. UN Women Pakistan berfokus pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Sesuai dengan agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan mengenai *gender equality* dan pemberdayaan perempuan.¹⁸

UN Women berusaha menciptakan suatu standar global dalam kesetaraan gender, lalu bekerja bersama pemerintah dan masyarakat untuk membuat aturan, program, serta layanan yang dapat menjamin standar tersebut dapat tercapai dan

¹⁷ UN Women. About UN Women. Di akses melalui <https://www.unwomen.org/en/about-us/about-un-women>, pada 17 Maret 2022.

¹⁸ UN WOMEN, UN Women Pakistan, Di akses melalui: <https://asiapacific.unwomen.org/en/countries/pakistan>, pada 17 Maret 2022.

menguntungkan perempuan di seluruh belahan dunia.¹⁹ Dan peneliti akan berfokus pada peran UN WOMEN atas isu kekerasan berbasis gender yang terjadi di Pakistan. Melihat kondisi berbagai ketidakadilan gender masih terjadi di Pakistan.

1.2 Rumusan Masalah

Isu ketidaksetaraan gender masih menjadi concern utama dalam masyarakat dunia. Kekerasan berbasis gender merupakan bentuk ketidaksetaraan gender dari kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perbedaan jenis kelamin dan nilai gender. Dimana hal ini cenderung tertanam dalam pemahaman yang dianut oleh masyarakat. seperti budaya patriarki yang melekat telah membatasi hak-hak perempuan dan membenarkan perilaku kekerasan. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah budaya patriarki yang melekat merupakan hasil dari konstruksi sosial masyarakat akibat pengaruh sikap, keyakinan, dan budaya yang diskriminatif, sehingga menyebabkan perilaku kekerasan menjadi wajar. Dan faktor pendukung lainnya, seperti sosial budaya, pendidikan, ekonomi, dan hak para pelaku kejahatan dan kekerasan berbasis gender untuk mendapatkan impunitas, turut andil dalam melanggengkan budaya kekerasan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah budaya patriarki yang ada dalam masyarakat Pakistan menyebabkan terjadinya perilaku dan bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dan lemahnya komitmen Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam menerapkan hukum. Perempuan Pakistan menderita berbagai jenis

¹⁹ UN WOMEN, About UN Women, *Loc.Cit*

kekerasan atau ancaman dalam kehidupan sehari-hari mereka baik di rumah, di tempat kerja atau di ruang publik. Budaya karo-kari atau pembunuhan demi kehormatan, dalam hal ini sering terjadi akibat sistem patriarki yang selalu memojokkan perempuan. Lain halnya dengan mahar atau pembayaran mahar seorang wanita kepada mempelai pria. Praktek ini tersebar luas di hampir seluruh Pakistan. Kekerasan berbasis gender berupa kekerasan dan penyerangan seksual hingga kekerasan dalam rumah tangga masih menghantui perempuan Pakistan hingga saat ini. Pakistan merupakan salah satu negara dengan tingkat kekerasan berbasis gender yang tinggi yaitu peringkat 153 dari 156 negara dan peringkat 7 dari 8 negara di Asia Selatan dalam survei “Global Gender Gap 2021.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Pakistan belum tercapai. Adanya kerjasama UN Women dengan Pemerintah Pakistan melalui Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030 sebagai target dalam upaya-upayanya di Pakistan dalam mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan. Dalam penelitian ini akan berfokus pada peran UN Women melalui upaya-upaya nya dalam membantu pemerintah Pakistan mengatasi kekerasan berbasis gender. Dari paparan tersebut penelitian memunculkan pertanyaan yakni: **“Bagaimana peran UN WOMEN dalam mengatasi kasus kekerasan berbasis gender di Pakistan tahun 2018-2021?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, alasan peneliti melakukan penelitian ini adalah untuk menggambarkan bagaimana kekerasan berbasis gender di Pakistan, serta ingin mengetahui bagaimana upaya UN WOMEN dalam mengatasi kasus kekerasan gender di Pakistan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan khazanah pengetahuan baru untuk masyarakat luas tentang bagaimana peran UN WOMEN dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di Pakistan. Melalui penelitian yang di lakukan berharapkajian ini akan bermanfaat dalam menambah wawasan dan informasi dalam kajian hubungan internasional. Serta memberikan kontribusi dan refleksi bagi para sarjana yang mempelajari mengenai kekerasan berbasis gender. Juga menjadi acuan bagi aktor individu dan kolektif dalam hubungan internasional, regional dan internasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika di gunakan untuk menjadikan penulisan sitematis dengan pembagian bab-bab yang akan di bahas pada penelitian:

Bab I: Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II: Berisi kajian pustaka yang terdiri dari penelitian terdahulu yang sesuai dan relevan sebagai rujukan untuk penelitian ini. Serta hasil penelitian tersebut dijadikan sebagai acuan oleh penulis pada proses penulisan. Dalam bab

ini juga berisi kerangka konseptual yang akan di gunakan untuk menjawab rumusan masalah dari penelitian.

Bab III: Bab ini menjelaskan metode penelitian yang berisi: pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV : Bab berisi mengenai pemaparan data yang sudah di temukan sebelumnya terkait dengan 3 sub judul pembahasan. Pertama memaparkan mengenai UN Women sebagai organisasi internasional. kedua gambaran umum mengenai kekerasan berbasis gender di Pakistan. Ketiga upaya UN WOMEN dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Pakistan. Serta pada bab ini akan di tambahkan analisis dengan pengaplikasian konsep organisasi internasional, human security dan konsep gender.

BAB V: Bab kelima dari penelitian ini berisi tentang kesimpulan dari keseluruhan hasil dan analisis mengenai peran UN Women dalam mengatasi kekerasan berbasis gender di Pakistan untuk dapat memberikan jawaban terkait dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.